BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Sektor Pertanian

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada bulan Juli 1977 yang berlanjut menjadi krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia ternyata sangat berpengaruh pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk. Di antara produk yang mengalami penurunan tersebut adalah produk-produk pertanian seperti produk ternak, tanaman pangan dan hortikultura serta produk tanaman perkebunan primer maupun olahannya. Meskipun sektor pertanian masih dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, karena mengingat peranannya dalam penyerapan tenaga kerja serta penghasil devisa dari sektor non migas, namun masih saja belum mampu menunjukkan peningkatan kinerja ekspor. Di sisi lain, walaupun dengan potensi sumber daya pertanian yang ada dan cukup besar Indonesia pernah menjadi eksportir terbesar seperti gula dan lada, namun tidak dapat bertahan lama.

Krisis multidimensi yang berkepanjangan juga turut memperburuk kondisi ekonomi bangsa Indonesia, seperti mengakibatkan pada menurunnya sumber devisa negara. Kenyataan ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik 2001 yang menunjukkan lambatnya pemulihan ekonomi bangsa Indonesia yang hanya mencapai 0,2 % sampai tahun 1999, sedangkan kawasan Asia pasifik seperti Hongkong, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Cina dan Thailan sudah mampu mencapai rata-rata 3,9 %. Keadaan seperti ini tidak saja hanya

terjadi di Indonesia dan asia akan tetapi sampai pada tataran dunia, terbukti dengan terjadinya resesi perekonomian global sejak tahun 1998, berakibat juga pada perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar negara di dunia dari 4,7 % pertahun pada tahun 2000 menjadi 2,6 % pada tahun 2001.

Data BPS dalam Departemen Pertanian (2002), dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perolehan nilai ekspor produk pertanian periode Januari 2001 sampai Mei 2002, juga masih belum memberikan pencerahan bagi perekonomian nasional di mana kontribusi ekspor sektor pertanian dari total ekspor nasional hanya 4,05 % atau senilai 991,2 juta dollar AS pada tahun 2001 dan 4,47 % atau senilai 995 juta dollar AS di tahun 2002, atau hanya tumbuh 0,42 %.

Total ekspor produk dari sektor pertanian Indonesia sebagai devisa negara hanya 1,39 % pada tahun 2000 atau bernilai US 7,764 milyar dari total ekspor produk pertanian dunia yang mencapai US 558,280 milyar. Kinerja ekspor produk pertanian Indonesia yang tergolong negara agraris terus mengalami penurunan sampai sekarang. Penurunan ekspor sektor pertanian Indonesia bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, menduduki urutan keempat setelah Cina, Thailand dan Malaysia, sedangkan urutan kelima diperoleh Philipina. (WTO Annual report dalam Deptan 2002)

Pada kondisi empat tahun terakhir menunjukkan bahwa hampir semua produk pertanian mengalami penurunan kecuali perdagangan sub sektor tanaman perkebunan, penurunan produk pertanian disebabkan oleh besarnya

laju impor dan besarnya laju penurunan produksi tanaman pangan. Neraca perdagangan komoditas tanaman hortikultura mengalami defisit pada tahun 1998 dan 2001, sedangkan pada tahun 1999 dan 2000 mengalami surplus. Tingginya impor produk hortikultura antara lain disebabkan oleh rendahnya bea tarif masuk sehingga produk hortikultura impor membanjiri pasar domestik. Keadaan ekspor impor dan neraca perdagangan produk pertanian Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Keadaan Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Produk Pertanian Indonesia Tahun 1998 – 2001.

Tahun	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Hsl Tanaman Pangan				
Ekspor	157.185	91.187	59.059	56.363
Impor	1.888.011	2.426.336	1.735.697	1.404.472
Defisit	-1.730.826	-2.335.149	-1.676.638	-1.348.109
Hsl Tanaman Perkebunan				
Ekspor	4.079.889	4.092.807	3.887.184	3.444.386
Impor	1.247.042	1.427.774	1.257.265	1.550.976
Surplus	2.832.847	2.665.033	2.629.919	1.893.410
Hsl Tanaman Hortikultura				
Ekspor	*77.678*	*352.270*	*298.853*	*156.788*
Impor	*113.111*	*137.219*	*237.710*	*464.261*
Defisit	*-35.433*	*215.051*	*61.143*	*-307.473*
Hsl Produksi Peternakan				
Ekspor	112.247	118.430	204.076	224.602
Impor	281.197	398.143	634.184	475.882
Defisit	-281.197	-279.713	-430.108	-251.280

Sumber : Data BPS (2001).

Dari tabel di atas secara keseluruhan bahwa sektor pertanian secara umum perlu dikembangkan dan ditingkatkan melihat masih adanya beberapa sektor yang mengalami penurunan. Ekspor produk pertanian juga mempunyai peluang yang cukup besar mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumberdaya pertanian yang mampu memberikan kontribusi besar sebagai sumber penghasil devisa negara, walaupun sementara baru di dominasi oleh sektor tanaman perkebunan. Dengan dikembangkannya sektor pertanian khusunya tanaman pangan, selain akan menambah devisa negara juga akan mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pembangunan tanaman pangan secara khusus dipandang sebagai rangkaian berbagai kegiatan yang mengimplementasikan konsep agribisnis secara utuh dan terkait erat dengan pembangunan wilayah pedesaan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, yang jika dikelola dengan baik dan benar sudah tentu akan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi negara. Perewujudan konsep dasar ini diperlukan penajaman pendekatan dan arah pembangunan dengan melakukan reorientasi dan reposisi subsektor tanaman pangan dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjelaskan dalam arah pembangunan daerah harus selalu memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Dalam Ketentuan Umum pasal 2, diantanya menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lain dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sebagai mana diatur dalam pasal 17

meliputi : (1) kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian, (2) bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, dan (3) penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Pelaksaan pembangunan subsektor tanaman pangan sebagai hasil pemanfaatan sumber-sumber dalam rangka otonomi daerah harus dapat memperkuat posisi petani, pelaku agribisnis lainnya serta aparatur pertanian. Pada kenyataannya walaupun terdapat keunggulan agroekosistem dari masing-masing daerah kabupaten maupun kota, masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Seperti yang dialami sebagian masyarakat petani tuna lahan yang bermata pencaharian atau bekerja sebagai penggarap lahan kawasan hutan lindung milik Perhutani. Kebanyakan lahan tersebut dilarang untuk dimanfaatkan dan dijadikan sumber mata pencaharian dengan tanaman tumpang sari. Masyarakat masih diperbolehkan menggunakan lahan Perhutani, akan tetapi dalam perubahan penggunaan lahan kawasan hutan harus memperhatikan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan pertujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan larangan ini sejalan dengan isi pasal 19 Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, yaitu untuk melindungi kawasan hutan atau lahan Perhutani dari pengrusakan seperti penebangan liar atau penyalahgunaan lahan yang dapat menimbulkan erosi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertanian dengan tidak mengorbankan masyarakat, diperlukan reformasi dan revitalisasi berbagai

program kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan maupun pengembangan kemampuan dari masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pengeluaran kebijakan tentang pengembangan jenis pertanian, perizinan dan ketentuan hukum yang kuat kepada masyarakat penggarap perlu ditegaskan, sebagai pegangan bagi petani dalam mengolah dan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pasar.

2. Kondisi hutan dan Kebijakan Perhutani.

Hutan merupakan bagian lingkungan hidup manusia yang sangat vital. Hutan merupakan sumber daya ekonomi sebagai pemasok kayu dan nir-kayu. Lahan hutan juga merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk pemukiman dan pembangunan perkebunan, atau dapat juga dijadikan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Kenyataannya dalam pemanfaatan lahan, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan fungsi ekologi hutan. Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, diantaranya sepertri ; hidro-orologi. penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpan, sink) karbon.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan ternyata berimbas pada keadaan sumber daya hutan. Peranan hutan dalam daur materi dan menjaga kesuburan tanah belum banyak diketahui dan disadari masyarakat, para birokrat dan pengusaha, seperti penyerobotan dan penebangan hutan yang mengabaikan program tebang pilih. Selama masa krisis tersebut, jumlah penyerobotan lahan dan pencurian kayu meningkat dan menimbulkan permasalahan bagi

kelestarian hutan. Penyalahgunaan yang dilakukan dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sebagaimana diungkapkan Arief Effendi dalam Duta Rimba (2001:27), yaitu dengan tidak mengindahkan peraturan tentang tebang pilih, yang telah membabat dan mengkoyak-koyak hutan Indonesia selama 30 tahun lebih. Dari luas hutan yang semula 144 juta hektar, kini efektif tinggal 113 juta hektar . Keadaan hutan seperti ini tentu bertentangan dengan isi pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa azas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan yang berazas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dan pasal 69 ayat 1 yang menyatakan ; masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Laju kerusakan hutan di Indonesia terus menunjukkan gejala peningkatan yaitu pada kurun waktu tahun 1982-1990 sebesar 0,9 juta Ha/tahun tak termasuk kebakaran hutan di Kalimantan Timur tahun 1982-1983 (Departemen Kehutanan, 1997), sedangkan pada kurun tahun 1987 - 1997 telah mencapai ± 1.6 juta Ha/tahun (Badan Planologi Kehutanan, 1999). Hasil rekalkulasi yang dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan Tahun 2001 pada kawasan Hutan Produksi diperoleh data luas penutupan hutan seperti di sajikan pada Tabel 1.2.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

Tabel 1.2.

Luas Penutupan Hutan pada Hutan Produksi di Areal HPH dan Areal Ex HPH di Indonesia Tahun 2000

No	Kondisi Penutupan Hutan	Areal HPH (Juta Ha)	Areal Ex HPH (Juta Ha)	Jumlah (Juta Ha)
1.	Hutan Primer	18,3	0,6	18,9
2.	Hutan Bekas Tebangan (sedang-baik)	11,1	2,5	13,6
3.	Hutan Rusak, Tanah Kosong, Pertanian dll.	11,7	2,6	14,3
	TOTAL	**41,1**	**5,7**	**46,9**

Sumber : Badan Planologi Kehutanan (2001)

Kondisi kerusakan hutan terlihat jelas pada areal Ex HPH di mana hutan primer tinggal tersisa seluas 0,6 juta Ha atau 11 % dari luas areal keseluruhan yang direkalkulasi. Sedangkan pada areal HPH yang masih aktif sisa hutan primer seluas 18,3 juta Ha.

Walaupun pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) secara bijaksana dan berkelanjutan telah menjadi kebijakan pemerintah dengan berbagai peraturan perundang-undangan kelengkapannya, namun dalam prakteknya telah terjadi pemanfaatan SDH secara berlebihan. Dengan terjadinya penebangan liar atau perambahan hutan dan kebakaran hutan yang tidak terkendali, mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang diindikasikan merosotnya fungsi hidro-orologis daerah aliran sungai (DAS).

Kerusakan yang sangat memprihatinkan tersebut bila tidak segera ditangani selain akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti bencana

alam yang selain dapat membahayakan kelestarian alam dan lingkungan juga masalah teknis seperti kerugian materi. Perhutani sebagai BUMN dibawah naungan Departemen Kehutanan yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola hutan, telah melakukan beberapa kebijakan pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan ekologi yang demikian cepat memerlukan paradigma baru dalam pembangunan, termasuk pembangunan atau pengelolaan sumber daya hutan. Paradigma baru yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) adalah adanya keseimbangan ekosistem *(Forest resources management)* dan menempatkan masyarakat sebagai sumber solusi *(Community based forest management)*.

Pengelolaan hutan yang profesional di Indonesia sudah lama dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sayangnya keberadaan masyarakat sekitar hutan belum mendapat tempat yang layak dalam peran sertanya mengelola hutan. Di sana-sini memang ada juga usaha berbagai pihak yang menyertakan masyarakat dalam mengelola hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan menjaga kelangsungan ekosistem yang ada. Bahkan arah pembangunan kehutanan juga ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khusunya rakyat penggarap di sekitar hutan. Sebagaimana diingatkan kepada kita tentang tema Kongres Kehutanan Sedunia ke VIII tahun 1978, *'Forest for People'* (Effendi, dalam Duta Rimba, 2001:27), bahwa kita menumbuhkan hutan bukan sekedar tetap menjaga keberadaan hutan itu untuk kelangsungan ekosistemnya tetapi lebih

[illegible] hutan itu ada untuk kesejahteraan manusia. Pada kenyataannya di [illegible] kita lihat bagaimana masyarakat disekitar hutan yang bergantung pada hutan ada yang diceraikan secara paksa, dan ini menimbulkan masalah sosial yang tidak ada habisnya dari waktu ke waktu.

Berangkat dari permasalahan yang dialami masyarakat, dan melihat kondisi SDH yang dirasa sudah sangat mengkhawatirkan tersebut, pemerintah melakukan perubahan paradigma pembangunan hutan yang bertumpu pada pendekatan ekosistem SDH berbasis pemberdayaan masyarakat. Inti dari kebijakan pembangunan kehutanan kedepan diarahkan untuk memberikan peran dan partisipasi aktif masyarakat secara proporsional.

Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua dewan Pengawas Perusahaan Umum Kehutanan Negara (P.T. Perhutani), Nomor ; 136/KPTS/DIR/2001, Pasai 8 tanggal 29 Maret 2001 tentang Kegiatan Pengelolaan yang menyatakan;

> "Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung"

Dengan adanya pergeseran kebijakan pembangunan kehutanan dan tata pemerintahan yang melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah serta perubahan tata sosial-budaya yang lebih transparan dan demokratis, sehingga diperlukan perubahan paradigma dan penataan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang disepahami oleh para pihak di

pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK/132/Menhut-II/2004 tanggal 30 April 2004, tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan yang dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Pedoman tersebut sesuai dengan isi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Penyuluhan pengelolaan sumberdaya hutan yang berwawasan lingkungan bagi pengguna lahan hutan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Kegiatan ini merupakan investasi untuk mengamankan dan melestarikan SDH sebagai aset negara. Penyuluhan tentang penggunaan lahan kehutanan sebagai sumber penghasilan masyarakat memiliki peran strategis, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat itu sendiri, maupun dalam upaya pelestarian SDH. Dua kegiatan penting yang menjadi ciri penyuluhan bagi masyarakat pengguna lahan hutan adalah penguatan kelembagaan dan pendampingan kearah masyarakat mandiri yang berbasis pembangunan kehutanan.

3. Kualitas Sumberdaya Manusia Sekitar Hutan

Permasalahan yang cukup besar di alami bangsa Indonesia adalah di bidang kependudukan dan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat menjadi masalah tersendiri, karena tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan, dan akhirnya menjadikan bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 1993 sebanyak 185 juta jiwa, tahun 1997 sudah mencapai 200 jiwa, dan tahun 2004 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 218 juta jiwa, 16.66 % (36,3 juta jiwa) dinyatakan sebagai penduduk miskin, (BPS, 2004).

Kemiskinan tersebut merupakan gejala nyata akibat dari situasi kekurangan materi dan ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Besarnya angka kemiskinan di Indonesia, terbesar ditemui di pedesaan, khususnya komunitas petani di pedesaan yang terkadang terabaikan suaranya meski memiliki andil besar dalam pembangunan dari sektor pertanian. Kondisi penduduk desa yang semakin terpuruk ke lembah kemiskinan, selain diakibatkan dari kurang meratanya pendistribusian hasil-hasil pembangunan, juga oleh sikap mental penduduknya yang mengalami kemiskinan secara alamiah maupun kultural. Kemiskinan alamiah dan kultural ini ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidakberdayaan mereka yang bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi. produktifitas, penguasaan modal, keterampilan dan teknologi serta hambatan infrastruktur maupun etnis sosial lainnya.

Berdasarkan pengalaman program pembangunan selama ini berupa Bimas, Bandes, PKT , P3KT dan program-program lainnya yang bertujuan

meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan, ternyata kurang mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Berbagai bentuk bimbingan, pembinaan bantuan dana, dan fasilitas yang disalurkan untuk meningkatkan kelembagaan, partisipasi dan swadaya atau kemandirian dalam pembangunan justru menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut. Bantuan program pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, lebih berorientasi pada pemenuhan *"target group"* pembangunan dan tidak memperhatikan kelanjutan program, proses pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM serta pelembagaan pembangunan. Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan kurang berorientasi pada pemberdayaan, pelembagaan pembangunan, dan peningkatan kemampuan kelembagaan atau kelompok masyarakat dalam menciptakan kualitas sumberdaya yang memiliki kemandirian, malah menciptakan ketergantungan.

Bila kita lihat lagi kebelakang sebagai konsekuensi logis dari kelemahan program yang telah dilaksanakan tersebut adalah dengan masih menumpuknya jumlah masyarakat yang miskin. Hasil survey BPS 2003 menunjukkan dari 36,3 juta jiwa penduduk miskin lebih banyak tinggal di pelosok pedesaan yang hidup sebagai petani, termasuk masyarakat nelayan dan masyarakat yang tergantung dari mengelola lahan hutan atau masyarakat desa hutan (MDH).

Kurang maksimalnya penggunaan sumberdaya di sekitar hutan, seperti pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan bagi kepentingan masyarakat,

juga turut mengakibatkan terus bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Padahal potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang tersedia sangat memungkinkan untuk dikembangkan, hanya saja dikarenakan berbagai keterbatasan kemampuan dari masyarakat dalam mengelolanya maka potensi tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Walaupun telah dikeluarkan kebijakan tentang hak untuk mengelola sumberdaya hutan secara mandiri kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan tentang HPHKM (Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan) melalui SK Menhut No 677/1998, namun pengeluaran kebijakan tersebut dianggap masih relatip baru, sementara kemiskinan masyarakat sekitar hutan sudah bertambah banyak. Di sisi lain dalam SK tersebut HPHKM hanya diberikan kepada masyarakat sekitar hutan yang terwadahi dalam bentuk koperasi dalam jangka waktu tertentu. Bagi masyarakat sekitar hutan yang tidak masuk kedalam anggota koperasi, dirasa kurang mendapat perhatian. Dengan demikian, kebijakan tentang hak pengelolaan ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh semua lapisan dan belum memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar hutan dalam jangka panjang.

Keterbatasan kemampuan yang dialami masyarakat sekitar hutan adalah akibat sebelumnya kurang diberdayakan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), sehingga menjadi penyebab kemiskinan bagi petani di desa hutan. Ketidakmampuan masyarakat pedesaan yang identik dengan kemiskinan selalu relevan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Pernyataan ini

dibuktikan dengan tingginya jumlah rumah tangga miskin di Indonesia yaitu sekitar 68,4 % tidak tamat SD, dan hanya 28,8 % rumah tangga miskin yang berpendidikan tamat SD. (Supriatna, 1997 :22). Di samping itu, selain rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmampuan yang dalami masyarakat juga diakibatkan dari dampak kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan pedesaan yang kurang berpihak pada petani dan komunitas desa. Belum lagi ditambah dengan banyaknya lahan pertanian masyarakat yang beralih fungsi yaitu mulai dari alih fungsi lahan hutan ke lahan perkebunan sampai lahan sawah yang meloloskan air *(permeable)* menjadi pemukiman dan industri yang cenderung tidak meloloskan air *(impermeable)*. Seperti di era orde baru yang pada tekanan pembangunan nasional lebih pada pembangunan manufaktur dan industri yang diperkotaan. Sementara pembangunan pertanian hanya difokuskan pada upaya pencapaian peningkatan produksi pertanian guna mencapai swasembada beras saja. Sebagai contoh tingginya laju alih fungsi lahan sawah menjadi lahan industri khususnya di pulau jawa, selain karena nilai tukar produk pertanian yang terus merososot, juga karena input dan resiko usaha tani cendeung meningkat dan tidak tetap *(unpredivtable)*, (Kompas, 30 Agustus 2002), sedangkan perhatian dan pengembangan sektor pertanian ke jenis komoditas lain kurang mendapat perhatian. Orientasi kebijakan yang demikian, jelas menempatkan petani dan sektor pertanian hanya menjadi objek pembangunan.

Kondisi di atas menambah beban masyarakat petani di luar padi semakin terpuruk. Keterpurukan ini juga semakin diperparah dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian subur terutama di sekitar hutan, ke penggunaan non pertanian serta masuknya agribisnis skala besar yang semakin menyulitkan petani kecil untuk bersaing. Sementara praktek pertanian yang berkembang disamping kurang melibatkan partisipasi masyarakat (lebih banyak menggunakan teknologi moderen), juga semakin merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan. Keadaan semacam ini menyebabkan bertambahnya kantong-kantong kemiskinan di hampir semua daerah atau propinsi di Indonesia, termasuk propinsi Jawa Barat.

Propinsi Jawa Barat dalam BPS, termasuk satu dari lima propinsi yang masih banyak terdapat kantong-kantong penduduk miskin, dan Jawa Barat berada pada urutan kelima. Urutan pertama sampai keempatnya adalah, Propinsi Jawa Tengah, D.I. Aceh, Propinsi Jawa Timur, dan Irian Jaya. Menurut data BKKBN Jawa Barat tahun 2004, masih terdapat 2,6 juta keluarga atau setara dengan 10,6 juta jiwa masih dinyatakan miskin. Sebagian besar masyarakat miskin tersebut tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan yang hidup sebagai petani, seperti bertani padi dan bertani sayur.

Kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat petani khususnya petani hortikultura di Jawa Barat selain akibat semakin terbatasnya lahan garapan, juga kemampuan bertani yang masih rendah. Kenyataan ini terlihat sebagaimana yang dialami masyarakat petani hortikultura di kawasan Bandung Utara, terutama bagi masyarakat petani penggarap lahan Perhutani.

Sebagian besar masyarakat petani hanya memiliki kemampuan yang terbatas pada bertani jenis komoditas tertentu atau pada jenis sayur-sayuran saja, dan tidak pada yang lainnya, sehingga dengan adanya peraturan agar masyarakat petani beralih ke jenis komoditas lain mereka tidak mampu untuk berbuat banyak. Kebiasaan bertani semacam itu merupakan tradisi yang telah lama dilakukan dalam keluarga maupun kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan hutan, dan hidup dari hasil menggarap lahan hutan. Terbatasnya kemampuan bertani bagi petani penggarap sebagaimana yang dialami di Jawa Barat khususnya di Bandung Utara lebih disebabkan oleh :

a. Petani menganggap lahan garapan mereka sebagai sumber mata pencaharian turun temurun yang tetap dan tidak akan diganggu lagi.
b. Petani merasa puas dengan usaha yang dijalankan tanpa harus mencari atau memikirkan modal, karena telah ada pemodal dari luar petani
c. Dari segi pemasaran hasil, masyarakat petani tidak terlalu memikirkan karena pemilik modal akan mengambil langsung ke petani
d. Belum adanya lembaga atau instansi terkait yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada masyarakat petani untuk mengembangkan ke jenis komoditas lain
e. Masyarakat petani penggarap lebih banyak menghabiskan waktu untuk tinggal di desa dan kurang menerima informasi pembangunan.

Dalam situasi ketidakmampuan petani di pedesaan, serta marjinalisasi sektor pertanian semacam ini, maka masyarakat perdesaan sekitar hutan perlu dilibatkan agar dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, dan

diupayakan agar dapat mengubah situasi tersebut dalam skala yang relevan melalui berbagai upaya pemberdayaan komunitas dan pengelolalaan sumberdaya agraria yang berkelanjutan. Salah satu kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan kesadaran kritis dan penguasaan terhadap teknologi yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan dialog kritis atas pilihan-pilihan teknologi yang relevan, dan berbagai upaya lain diharapkan akan mendorong penguatan posisi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, khususnya mereka yang miskin.

Dari ketidakmampuan yang dialami masyarakat sekitar hutan. akibat kurangnya pemberdayaan akan berpengaruh pada penurunan tingkat kesejahteraan. Permasalahan utama bagi petani penggarap yang menjadi penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan sehingga masyarakat menjadi miskin, juga disebabkan oleh berbagai faktor atau keterbatasan, diantaranya :

a. Sebagian petani sekitar hutan miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya *(they are poor because they are poor)*

b. Luas lahan petani penggarap semakin berkurang atau sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi

c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan atau modal

d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik

e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai

f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar *(bargaining position)* yang sangat lemah

g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani dan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan angka pengangguran ikut bertambah.

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas, secara umum permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat desa di sekitar hutan lebih banyak disebabkan oleh :

a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang hidup dalam sektor pertanian, serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat di sektor pertanian dan diluar sektor pertanian.

b. Kepemilikan lahan yang dirasakan masyarakat semakin sempit dan terbatasnya peluang untuk bekerja diluar sektor pertanian.

c. Selain tidak dimilikinya faktor produksi sendiri, juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.

d. Kondisi alam dan geografis desa yang sebagian sulit dijangkau sarana transportasi dan komunikasi lainnya sehingga akses informasi yang masuk ke desa sangat terbatas.

Keterbatasan akses sumberdaya yang tersedia dari informasi di samping sebagai penyebab pada ketidakmampuan masyarakat, juga

menyebabkan masyarakat miskin akan tetap dalam lingkaran kemiskinan. Secara umum menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kelompok miskin selalu kalah bersaing dalam memperoleh akses dibanding kelompok yang lebih kaya, sehingga berbagai sumberdaya yang tersedia bagi mereka tidak banyak manfaatnya.

Desa Suntenjaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung yang memiliki potensi alam cukup baik di bidang tanaman pangan seperti hortikultura. Dikatakan baik karena selain memiliki curah hujan yang cukup dengan rata-rata 2.027 mm pertahun, juga memiliki suhu udara yang cukup mendukung pula yaitu rata-rata 20 derajat celcius. Desa yang memiliki luas wilayah 1.465,56 ha ini sebagian besar adalah hutan dan pegunungan, yaitu seluas 1.039 ha. Lahan hutan ini adalah milik Perhutani yang dimanfaatkan sebagian masyarakat Suntenjaya sebagai sumber mata pencaharian dengan bertani jenis sayur-sayuran. Dari 6.503 jiwa jumlah penduduk desa Suntenjaya. 2.465 jiwa adalah hidup sebagai petani.

Desa Suntenjaya dipilih sebagai daerah penelitian karena sekarang masyarakat desa sebagai penggarap, tidak lagi dapat mengolah lahan untuk dijadikan sumber mata pencaharian seperti sayur-sayuran, dengan di keluarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 522/1224/Binprod tanggal, 20 Mei 2003 tentang Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Jawa Barat. Alasan diberlakukan larangan ini, karena desa tersebut termasuk hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan atau tangkapan air *(catchment area)* untuk

kota Bandung. Di samping itu jika lahan tetap diolah dengan cara dicangkul atau dibajak, dikhawatirkan selain mengurangi pasokan air bagi masyarakat kota Bandung, juga akan menimbulkan bencana tanah longsor. Pada prinsipnya lahan masih dapat dipergunakan sebagai sumber mata pencaharian, namun masyarakat harus bersedia mengganti jenis mata pencaharian yang sebelumnya bertanam sayur-sayuran ke jenis komoditas lain yang tidak harus terus menerus mengolah lahan atau tanah.

Dari berbagai keterbatasan sumberdaya sekitar hutan sebagaimana ungkapkan diatas, globalisasi dalam berbagai aspek sosial ekonomi pada kenyataannya telah menjadi ancaman serius bagi usaha pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Walaupun disadari pula menjadi peluang jika dapat diwujudkan suatu pembinaan kepada masyarakat seperti melalui pelatihan keterampilan secara terpadu dari berbagai elemen. Kegiatan pelatihan keterampilan secara terpadu akan mampu membantu masyarakat dalam menemukan mata pencaharian sesuai potensi lingkungan untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani

4. Kontribusi PLS dalam Pembangunan Masyarakat

PLS dalam pembangunan masyarakat bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam arti luas. Secara umum program PLS selalu dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup yang lebih spesifik dari kelompok belajar itu sendiri. Artinya kurikulumnya harus fleksibel, programnya mengikuti prinsip

diversifikasi yang responsif terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan secara nasional, berhubungan dengan isu tentang masalah yang dihadapi mamsyarakat pada saat ini, termasuk penguatan motivasi kelompok belajar untuk berusaha atau berkarya. Sebagai sub sistem pendidikan yang mampu memupuk profesionalisme dan jati diri sumberdaya manusia dalam menghadapi era globalisasi melalui berbagai program pendidikan sepanjang hayat *(life long education)*, PLS juga mampu sebagai pendorong utama bagi masyarakat untuk memperoleh kemajuan secara terus menerus dalam berbagai lapangan usaha. Di antara program PLS tersebut adalah seperti kegiatan pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat petani penggarap lahan Perhutani. Sebagai masyarakat marginal yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan berpenghasilan relatif kecil, pemberian pelatihan bertujuan agar masyarakat memiliki keterampilan baru yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pelatihan di masyarakat selain dapat bermanfaat guna memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat juga dapat ikut berperan dalam kegiatan pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai harapan tersebut dalam jangka panjang, isi atau materi yang diajarkan pada program PLS diarahkan pada:

a. Usaha membangkitkan rasa sadar dan tanggung jawab terhadap perlunya menciptakan situasi lingkungan yang sehat dalam masyarakat. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara swadaya serta mengusahakan tumbuhnya perubahan berencana yaitu pembangunan.

b. Mendorong masyarakat desa agar terampil untuk memanfaatkan lahan pertanian secara rasional, objektif, dan berlandaskan pola pikir ilmiah.

c. Memperkuat potensi masyarakat desa untuk membangun, sehingga sumber-sumber yang ada di masyarakat semakin bertambah, serta kreativitas individu dan kelompok semakin meningkat.

d. Meningkatkan pengertian terhadap relevansi fungsi belajar bagi kelompok belajar dan seluruh masyarakat.

e. Mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik secara individual, sosial, budaya dan ekonomi, melalui aksi demokratik dan partisipasi aktif dari masyarakat.

f. Membangun suatu lingkungan belajar yang kondusif yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar mandiri.

g. Menciptakan pembagian kesempatan dan kekayaan sosial secara adil, khususnya kesempatan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak pada berbagai segmen yang ada dalam masyarakat.

Fungsi PLS dalam pembangunan masyarakat sesuai hasil penelitian Lewis dalam Philip H. Coombs; (1968) yang bekerjasama dengan Dewan International untuk Pengembangan Pendidikan (ICED) atas bantuan Bank Dunia melakukan penelitian pada negera berkembang. Dari hasil penelitiannya terungkap bahwa negara berkembang umumnya mempunyai masalah jumlah penduduk yang tinggi, pendapatan perkapita yang rendah, rata-rata 40 persen penduduknya adalah miskin, dan adanya pengangguran, serta rendahnya

tingkat pendidikan. Coombs juga berpendapat bahwa untuk mengatasi kemiskinan pada negara berkembang dipandang perlu untuk mengadakan program pembangunan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat miskin baik itu melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Pengalaman di negara berkembang seperti Korea Selatan, RRC, Thailand, dan India sebagaimana diungkapkan Mangatas dalam Depdiknas (2001:10) telah mebuktikan bahwa PLS, sebagai *human investment*, mampu meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin dipedesaan, karena dalam jangka pendek kegiatan PLS telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan di luar sektor pertanian. Mereka berhasil membangun industri pedesaan setelah terlebih dahulu meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya melalui PLS.

PLS sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional telah diyakini memiliki kontribusi yang strategis dan tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan nasional. Pernyataan ini sesuai dengan beberapa uraian diatas, yaitu berbagai program kegiatan yang dilakukan terbukti telah mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap bagi masyarakat, yang memang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan yang berkembang dalam menuju masa depan yang lebih baik.

Di dalam menerapkan berbagai program PLS, kurikulum dan kegiatan pembelajaran atau waktu belajarnya dapat disepakati bersama antara warga belajar dengan fasilitator, dan diusahakan dengan mendayagunakan sumber-sumber daya lokal. Santoso dalam Trisnamansyah (1992) dan Sudjana (1993),

untuk melaksanakan agar tugas-tugas PLS mampu berperan optimal, ada tujuh azas yang perlu diperhatikan, yaitu ; (1) asas inovasi, (2) asas penentuan dan perumusan tujuan pendidikan, (3) asas perencanaan dan pengembangan program pendidikan nonformal, (4) asas kebutuhan, (5) asas pendidikan seumur hidup, dan (6) asas relevansi dengan pembangunan, dan (7) asas wawasan ke masa depan.

Pembangunan masyarakat melalui PLS, khususnya melalui program pendidikan orang dewasa bertujuan untuk mendidik masyarakat agar secara mandiri mampu meningkatkan pendapatan dan membuka peluang kesempatan kerja, dan juga mampu memecahkan masalahnya serta memenuhi kebutuhannya dengan prinsip *"mobilizing available resources to meet the needs and to solve the problems"*.

Sehubungan dengan tujuan PLS khususnya bagi orang dewasa, K. Patricia dalam Lamdin (1991:59) *"The Road to the Learning Society"*, mengungkapkan bahwa: pendidikan orang dewasa dan belajar pengalaman sejenis pendidikan keterampilan, yang khusus diberikan kepada masyarakat pedesaan terutama penduduk miskin, diarahkan agar: (1) mereka mempunyai akses terhadap penambahan pengalaman hidup dan pengalaman sebagai dasar pendidikan, kesempatan kerja, latihan keterampilan, dan pemupukan profesi; (2) menjadi dasar untuk perubahan struktur sosial ekonomi; (3) memberikan basis terhadap penumbuhan sikap kelompok, komunikasi, dan tindakan sosial; (4) menumbuhkan dan mengembangkan personel dari aspek sikap efektivitas kelompok.

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa PLS mampu memberikan kontribusi dalam bentuk perubahan. Adanya perubahan perilaku berupa pengetahuan baru, keterampilan baru, dan sikap mental yang positif merupakan dasar bagi perubahan kehidupan dalam struktur sosial-ekonomi maupun sosial-budaya. Masyarakat dapat menjadi sumberdaya manusia (SDM) yang produktif dan mandiri dalam arti mampu menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedasaan.

B. Identifikasi Masalah

Terpinggirkannya pembangunan sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, terutama selama pembangunan jangka panjang pertama yang lebih menitikberatkan pada industrialisasi, membuat angka kemiskinan di pedesaan terus bertambah. Kebebasan petani dalam menentukan jenis pertanian untuk kebutuhan dan nasibnya sendiri tidak mampu bertahan lama, bahkan tidak tercapai. Walaupun masih tetap ada pembangunan sektor pertanian, namun sebagain besar belum mampu menyentuh sesuai kebutuhan petani. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri diantaranya selain menyebabkan petani kekurangan lahan, juga menyebabkan jumlah perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian menjadi meningkat. Sementara para petani sendiri sebagai SDM tidak memiliki bekal yang cukup seperti pengetahuan teknis atau ekonomis yang memadai untuk digunakan sebagai dasar dalam mengelola

atau mengolah sumberdaya alam (SDA) yang ada. Kondisi seperti ini kalau terus dibiarkan akan dapat berakibat merusak. Kerusakan tersebut bisa terjadi karena faktor ketidak tahuan, dan faktor perbedaan pola pikir. Sesungguhnya keberadaan masyarakat petani juga mampu mendorong pembangunan, hanya saja terasa masih kurang mendapat perhatian sehingga menjadi terbelakang dan miskin.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Dorodjatun Kuncoro-Jakti, (1994:1), yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang dialami masyarakat desa sehingga menjadi terbelakang dan miskin atau yang lebih tepat disebut dengan masalah struktur adalah; disebabkan dengan semakin buruknya perbandingan antara luas tanah dan jumlah individu dan pola pemilikan atas tanah. Masalah struktur ini mendorong meningkatnya jumlah angka pengangguran baik terselubung maupun terbuka, serta berlakunya upah rendah. Selain itu, meningkat pula jumlah kaum proletariat (buruh) dikalangan petani, ditambah semakin kuatnya birokrasi negara yang bersifat nepotistik dan feodal.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat desa khususnya golongan orang dewasa, diantara penyebabnya adalah tingkat pendidikan mereka yang juga rendah. Dengan pengetahuan yang rendah masyarakat tidak dapat memanfaatkan SDA yang tersedia dengan tepat guna untuk meningkatkatkan kesejahteraan mereka. Sementara kaum muda yang memiliki pola pikir dinamis dan rasional lebih cenderung melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan atau sebagai buruh diperkotaan. Akibatnya SDM yang tinggal di

desa adalah mereka yang pola pikirnya statis, tradisional dan sulit mengadopsi inovasi. Walaupun demikian, orang dewasa sebagai bagian dari masyarakat yang banyak tinggal di pedesaan sesungguhnya juga memiliki potensi dan tidak bodoh, mereka punya prakarsa yang apabila distimulasi akan mampu mengembangkan dirinya.

Terjadinya urbanisasi, terutama bagi kaum muda lebih banyak disebabkan karena pemerintah kurang mengutamakan pembangunan industri pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian. Solusinya adalah melaksanakan pembinaan dan pembangunan industri bagi masyarakat desa. Kondisi seperti ini akan dapat diatasi dengan pendekatan desentralisasi, yaitu pembangunan industri pedesaan yang sekaligus mampu meningkatkan pendapatan dan membuka peluang kerja baru di pedesaan. Sebagai contoh Korea Selatan dan RRC mampu membangun industri maju, setelah mereka berhasil mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan di pedesaan melalui pembangunan industri pedesaan. Dengan pemberian pendidikan terutama melalui program PLS, mampu membekali masyarakat desa dengan pengetahuan yang praktis, sikap mental yang baik, dan keterampilan yang handal sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan secara efektif. (Balitbang Depdiknas 2001).

Melihat semakin sempitnya lahan pertanian dan rendahnya tingkat pendidikan petani, tidak dapat dipungkiri lagi kalau keberadaan masyarakat petani akan semakin tepojok, dan akhirnya keluar dari kelompoknya mencari lahan yang dapat diolah untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Di antara upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi keadaan yang

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

demikian adalah dengan merambah hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Hutan menjadi sasaran masyarakat dengan harapan dapat dimanfaatkan dan dijadikan modal utama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara adanya keterbatasan kemampuan masyarakat petani yang tinggal dan hidup dari hasil mengolah lahan hutan merupakan sesuatu yang harus segera dipecahkan. Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut dapat dipecahkan dan dikembangkan melalui pemberian pelatihan.

Pelatihan yang diberikan adalah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan kepada siapapun sehingga dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kegiatan pelatihan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Proses pelatihan dapat terlaksana bila didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas baik yang berasal dari masyarakat maupun instansi terkait. Dukungan yang diberikan dalam arti untuk mendampingi serta mampu berperan baik sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama program berlangsung, dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh kelompok. Perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri dan kreatif

dalam mengembangkan usaha produktif merupakan fokus dari pelaksanaan program pelatihan.

Kampung Pasir Angling adalah salah satu kampung yang dijadikan sebagai sasaran lokasi penelitian. Kampung Pasir Angling berada di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung. Masyarakat kampung Pasir Angling dan kampung-kampung yang lain di desa Suntenjaya sebelumnya hidup sebagai petani hortikultura penggarap lahan Perhutani dengan jenis sayur-sayuran. Sejak diberlakukannya larangan menggarap lahan untuk ditanam dengan jenis komoditas tersebut oleh pemerintah, kini masyarakatnya menjadi lebih banyak menganggur. Keberadaan program pelatihan sangat dinantikan, mengingat lahan yang semula mereka gunakan sebagai sumber mata pencaharian utama, belum dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan lagi hanya dikarenakan masyarakatnya tidak mampu mengembangkan usahanya ke jenis komoditas lain sesuai anjuran pemerintah. Selama ini kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat pengguna lahan Perhutani khususnya di Desa Suntenjaya kurang mendapat perhatian, sehingga dengan diberlakukannya peraturan agar masyarakat penggarap harus beralih ke jenis komoditas lain seperti tanaman keras atau bukan tanaman semusim, masyarakat Suntenjaya tidak dapat berbuat banyak.

Memperhatikan kondisi masyarakat petani sebagai pengguna lahan Perhutani, maka program pelatihan yang diberikan selain harus disesuaikan dengan kebutuhan, juga harus sejalan dengan program pemerintah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah harus disesuaikan dengan potensi

sumberdaya yang ada baik SDM, SDA, sumberdaya teknologi dan lingkungan. Penyesuaian ini bertujuan, agar segala aktivitas yang akan dilakukan tidak mengalami hambatan, dapat memberikan manfaat dan mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat petani itu sendiri.

Dipilihnya kampung Pasir Angling dalam desa Suntenjaya sebagai lokasi penelitian, karena: (1) seluruh masyarakatnya yang terdiri dari 180 kepala keluarga bekerja sebagai petani penggarap di lahan milik Perhutani, saat ini tidak memiliki martapencaharian tetap lagi, (2) potensi sumberdaya yang ada masih memungkinkan untuk dikembangkan, (3) belum adanya pihak lain yang memberikan bantuan baik dalam bentuk pelatihan maupun modal usaha, dan (4) adanya dukungan baik dari masyarakat setempat maupun pemerintah daerah.

Dari beberapa catatan hasil identifikasi sesuai kebutuhan masyarakat petani dan didukung potensi yang ada di daerah, terpilihlah sepuluh orang untuk dijadikan sebagai calon peserta pelatihan. Peserta yang terpilih didasarkan atas beberapa persyaratan diantaranya seperti tingkat kemampuan baca tulis dan berhitung, usia, minat, serta kesediaan untuk menularkan pengetahuan yang akan di peroleh dalam pelatihan kepada orang lain yang membutuhkan. Pemilihan dan penentuan jumlah peserta dilakukan dengan melibatkan para tokoh masyarakat desa Suntenjaya, sehingga benar-benar terpilih orang-orang yang membutuhkan dan memiliki minat serta semangat pengabdian yang tinggi.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas ditemukan suatu rumusan yang menjadi kesenjangan atau permasalahan pokok di kalangan masyarakat

kampung Pasir Angling khususnya dan desa Suntenjaya umumnya, yaitu; masyarakat yang selama ini bermata pencaharian sebagai petani hortikultura dengan jenis komoditas sayur-sayuran, belum mampu untuk beralih komoditas atau beralih ke usaha lain. Kemampuan keterampilan yang dimiliki masyarakat saat ini harus dapat dikembangkan agar dapat dijadikan sebagai sumber usaha sesuai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kesenjangan yang dihadapi dan dialami masyarakat petani ini, karena urgensinya bila dilihat dari pemenuhan kebutuhan harus beralih usaha ke jenis komoditas lain sesuai aturan yang berlaku atau diperbolehkan segera memerlukan pemecahan. Kesenjangan ini juga diasumsikan bersumber dari ketidakmampuan untuk melakukan transformasi dan melakukan kegiatan belajar yang terus menerus, memilih dan melakukan interaksi dengan lingkungannya.

Permasalahan tersebut difokuskan pada ; *Pertama,* bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengalihkan jenis usaha masyarakat petani penggarap lahan Perhutani dari bertani sayur-sayuran kejenis komoditas lain, sehingga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian baru. *Kedua,* tentang bagaimana proses atau penyelenggaraan pelatihan keterampilan usaha terpadu dilakukan, dan seberapa besar hasil dari pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani.

C. Perumusan Masalah

Pelatihan sebagai salah satu model program PLS dianggap relevan untuk terus dikembangkan dan memiliki peran dalam membantu

meningkatkan martabat dan kualitas warga masyarakat Pernyataan yang sejalan dengan PP No.73 Tahun 1991 tersebut diantaranya melalui pelatihan keterampilan usaha terpadu. Alasan perlu dikembangkannya model pelatihan keterampilan ini kepada masyarakat petani penggarap diantaranya karena :

1. Peserta pelatihan dapat langsung menerapkan hasil dari pelatihannya untuk menggantikan keterampilan sebelumnya dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Jenis kegiatan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumberdaya yang ada
3. Jenis keterampilan yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai sumber usaha baru dan sesuai dengan permintaan pasar
4. Peserta pelatihan dapat menguasai beberapa jenis keterampilan hanya dengan mengikuti satu program kegiatan.
5. Peserta pelatihan tidak saja hanya terampil dalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi juga mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap mentalnya.

Kegiatan pelatihan yang sedang berkembang di masyarakat sangat bervariatif sesuai dengan bidang pekerjaan atau kebutuhan yang tumbuh dan sedang mereka hadapi. Walaupun demikian dalam pengembangannya tetap perlu memperhatikan berbagai sumberdaya yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Sudjana (1992), bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan akan sangat membantu dalam pemantapan proses pembelajaran, mengingat setiap daerah memiliki sumberdaya yang berbeda maka sumberdaya yang dikembangkan hendaknya memiliki keunggulan bila dibanding dengan daerah lainnya.

Masyarakat kampung Pasir Angling di desa Suntenjaya sebagai sasaran pelatihan yang selama ini bekerja sebagai petani penggarap lahan Perhutani memiliki areal garapan yang masih dapat dimanfaatkan seluas 35 hektar. Semenjak diberlakukannya larangan untuk menggarap lahan dengan jenis sayur-sayuran, lahan yang masih dapat dimanfaatkan ini menjadi tidak produktif. Pada prinsipnya pemerintah setempat masih memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan lahan Perhutani, namun harus dialihkan ke jenis komoditas lain seperti tanaman keras atau bukan tanaman semusim.

Secara umum masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah "Bagaimana model pelatihan keterampilan usaha terpadu bagi petani hortikultura penggarap lahan Perhutani sebagai upaya alih komoditas di Desa Suntenjaya?". Berangkat dari permasalahan tersebut, kemudian dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi masyarakat petani dan lingkungan pertanian desa Suntenjaya yang dijadikan sebagai sasaran pelatihan keterampilan usaha terpadu dengan jenis tanaman pisang, ternak sapi, ternak kelinci dan jual beli?
2. Bagaimana model pelatihan keterampilan usaha terpadu yang dikembangkan dapat memberdayakan masyarakat petani dalam beralih komoditas dari sayuran ke bertanam pisang, ternak sapi dan kelinci ?
3. Bagaimana keefektifan model pelatihan keterampilan usaha terpadu yang sebelumnya hanya bertanam jenis sayuran menjadi bertanam pisang, beternak sapi, beternak kelinci dan berjual beli?

D. Definisi Operasional

Sebagai acuan mengenai beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa definisi operasional;

1. Model adalah pedoman untuk merancang kegiatan pendidikan dan lingkungan, menguraikan cara-cara pembelajaran dan belajar dalam upaya mencapai jenis-jenis tujuan tertentu. Suatu model mencakup rasional yaitu teori yang melandasinya dan memaparkan kebaikan serta alasan-alassannya yang dapat dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukungnya. (Joyce and Weil, 1992). Sedangkan Abdulhak (2000:11), mengungkapkan model diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.
2. Pelatihan keterampilan usaha terpadu diartikan sebagai kegiatan yang dirancang sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai elemen atau pihak lain sebagai upaya untuk menemukan suatu jenis keterampilan yang saling terkait dan mendukung jenis keterampilan lainnya. Menurut Dugan Laird (1985) bahwa pelatihan merupakan solusi yang sangat tepat bagi "*Performance problem*" yang disebabkan oleh faktor pengetahuan, keterampilan individu yang kurang memadai bagi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan keterampilan juga tidak terlepas dari kegitan pembelajaran, sebagaimana yang diungkapkan Davies (1991:276), bahwa kegitan pembelajaran keterampilan meliputi dua segi, yaitu untuk mengetahui dan melakukan. Kata terpadu, selain memadukan beberapa jenis keterampilan, juga merupakan upaya bersama dalam

membangun masyarakat petani hortikultura melalui pelatihan. Tujuannya untuk menemukan jenis usaha atau beralih ke usaha lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses keterpaduan dimulai sejak pelaksanaan identifikasi pemilihan jenis usaha, pelaksanaan pelatihan, permodalan, pembinaan, dan sampai kepada kegiatan pemasaran. Sudjana (1996: 209), mengungkapkan keterpaduan sebagai upaya bersama itu bertopang pada kemampuan masyarakat yang diwujudkan dalam swadaya dan kegotong royongan, kreativitas, dan sikap inovatif dari masyarakat itu sendiri, sedangkan pihak pemerintah atau bantuan dari pihak lain berfungsi sebagai pendorong agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya.

3. Pemberdayaan masyarakat adalah, setiap usaha masyarakat dalam membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan anggota masyarakat terhadap faktor-faktor atau unsur-unsur dinamika masyarakat yang dapat diberdayakan, guna menghidupkan, membangkitkan, menggerakkan atau mengaktifkan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. (Kindervatter, 1979). Proses pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kapasitas masyarakat petani sebagai warga belajar melalui kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan yang dipusatkan dalam pekerjaan. Melalui kegiatan tersebut ditandai dengan adanya keakraban, bimbingan, dan partisipasi yang memungkinkan peserta belajar memperoleh keahlian yang diperlukan pada bidang pekerjaannya.

4. Masyarakat agraris (petani) adalah sekelompok masyarakat yang tinggal dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sektor pertanian. Masyarakat pertanian sebagai mana yang diungkapkan Shanin (1971) yang dikutip Nasikun (1992 :7) memiliki ciri-ciri : (1) mempunyai hubungan dengan tanah dengan ciri spesifik produksi pertanian berakar pada keadaan khusus petani; (2) usaha tani keluarga merupakan satuan dasar pemilikan produksi dan konsumsi dan kehidupan sosial petani; (3) kepentingan pokok pekerjaan dalam menentukan kedudukan sosial, peranan dan kepribadian petani dikenal secara baik oleh masyarakat yang bersangkutan; (4) struktur sosial dasar merupakan keadaan khusus bagi daerah tertentu dan waktu tertentu; dan (5) masyarakat petani merupakan sebuah kesatuan sosial pra-industri yang memindahkan unsur-unsur spesifik struktur sosial ekonomi dan keberdayaan lama dalam masyarakat kontemporer.

6 Alih komoditas; diartikan sebagai pengubahan suatu jenis barang dagangan yang satu ke jenis barang dagangan yang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:25). Alih komoditas dimaksudkan sebagai upaya untuk menggantikan jenis kegiatan atau usaha yang telah dilakukan dan diperdagangkan sebelumnya dengan jenis kegiatan atau usaha yang lain.

7 Pengetahuan, keterampilan dan sikap, merupakan dasar pengembangan dalam menjalankan usaha yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Aspek pengetahuan, yaitu : mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan yang meliputi ; fakta,

kaidah dan prinsip, serta metode yang diketahui. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan akan digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat *(recall)* atau mengenal kembali *(recognition)*, (Winkel, 1996:345).

b. Aspek keterampilan yaitu: mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu rangkaian gerak-gerik yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat dan efisien. Kemampuan disini sebagai hasil dari kegiatan pelatihan, sehingga tanpa perlu memperhatikan lagi contoh yang diberikan. (Winkel, 1996:249).

c. Aspek sikap yaitu : mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Mulai dibentuk suatu sikap menerima, menolak atau mengabaikan serta senang dan tidak senang. Sikap itu dinyatakan dalam tingkah laku yang sesuai dan konsisten dengan sikap batin (Winkel, 1996:248).

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan model pelatihan keterampilan usaha terpadu yang efektif dalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat agraris pasca diberlakukannya larangan menggarap lahan perhutani dengan komoditas tertentu. Tujuan penelitian tersebut dapat diperinci untuk:

1. Memperoleh data tentang kondisi masyarakat petani dan lingkungan pertanian desa Suntenjaya yang akan dijadikan sebagai sasaran pelatihan keterampilan usaha terpadu dengan jenis tanaman pisang, ternak sapi, ternak kelinci dan jual beli.
2. Mengembangkan model pelatihan keterampilan usaha terpadu yang dapat memberdayakan masyarakat petani dalam upaya alih komoditas dari jenis sayuran ke bertanam pisang, ternak sapid an kelinci.
3. Memperoleh data tentang keefektifan model pelatihan keterampilan usaha terpadu yang sebelumnya hanya bertanam sayuran menjadi bertanam pisang, beternak sapi, beternak kelinci dan berjual beli?

b. Manfaat Penelitian :

Secara teoritis, manfaat penelitian ini bila dilihat dari segi kontribusinya diharapkan mampu menemukan proposisi-proposisi empirik yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi teori, sehingga dapat menambah perbendaharaan keilmuan, khususnya dalam kaitan pengembangan kemampuan menjalankan usaha secara terpadu dan penguatan pengelolaan program PLS dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, dan umumnya bagi peningkatan martabat dan kualitas kehidupan masyarakat petani dari ketidakmampuan.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan dapat memberikan masukan dalam membantu menemukan mata pencaharian serta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat seperti :

1. Mampu memberikan masukan dalam upaya menemukan model untuk membelajarkan masyarakat petani khususnya, baik yang berhubungan dengan aspek keilmuan dan penerapannya sebagai dasar dalam pengembangan potensi melalui pembelajaran dengan memperhatikan aspek ekonomis, politis dan sosial.
2. Keefektifan model pelatihan dan program pemberdayaan bagi keberhasilan usaha masyarakat petani, baik dalam pelatihan dan pemberdayannya itu sendiri, pemilihan jenis komoditas serta pengembangannya dimasyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Penyelenggaraan program-program Pendidikan Luar Sekolah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat petani hortikultura, baik melalui pembelajaran maupun pelatihan.

F. Paradigma Penelitian

Model pelatihan keterampilan usaha terpadu bagi petani penggarap lahan Perhutani adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan dan mengefektifkan berbagai potensi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk berusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat tani melalui model pelatihan keterampilan usaha terpadu diharapkan dapat dipakai sebagai solusi dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat petani. Hasil dari model pelatihan keterampilan usaha terpadu yang diberikan pada kelompok masyarakat petani dapat merubah kehidupan masyarakat. Perubahan ini

ditandai dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dari masyarakat setelah pelatihan, dan dapat dijadikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks pemberdayaan, agar masyarakat mampu berkembang dan profesional, arah dari pembelajaran dalam model pelatihannya dirancang dan disesuaikan dengan standar kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat yang sebelumnya hanya mampu bertani sayur-sayuran, dengan diberikan pelatihan keterampilan usaha terpadu menjadi mampu bertani pisang, beternak sapi, beternak kelinci dan melakukan jual beli dari masing-masing produk jenis usahanya..

Fokus dan landasan pemikiran penelitian model pelatihan keterampilan usaha terpadu tidak terlepas dari faktor determinatif baik secara *internal* seperti adanya keinginan masyarakat untuk berubah, maupun *eksternal* seperti adanya pihak lain yang membantu untuk merubah. Di samping itu ada faktor lain yang paling dominan sebagai pendukung pengembangan kemampuan masyarakat petani penggarap lahan Perhutani di desa Suntenjaya dalam berusaha, yaitu tentang : 1) Kebijakan pemerintah daerah yang masih memperbolehkan masyarakat untuk mengolah lahan Perhutani dengan jenis komoditas lain, dan 2) Tersedianya lahan pertanian yang luas, tersedianya jenis tanaman pengganti yang sesuai dengan kondisi lingkungan, tersedianya tenaga ahli yang bersedia untuk dijadikan sebagai nara sumber, tersedianya mitra usaha dan tempat memasarkan hasil, serta adanya minat dari masyarakat petani itu sendiri.

Sebelum dilakukan kegiatan pengembangan kemampuan melalui pelatihan, terlebih dahulu yang juga perlu diperhatikan adalah mengenal potensi yang dimiliki masyarakat, seperti : 1) potensi diri, yaitu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat saat ini, 2) potensi lingkungan yang dapat dan akan dijadikan sebagai pendukung kegiatan, serta 3) potensi usaha yang memiliki peluang dan memungkinkan untuk dikembangkan.

Hasil *(output)* dari pelatihan keterampilan usaha terpadu yang fokus kajiannya pada pengembangan kemampuan petani dalam beralih komoditas dan dapat dijadikan sumber usaha. Secara langsung hasilnya akan dapat terlihat dengan terjadinya perubahan pada diri petani seperti; 1) meningkatnya pengetahuan petani dalam mengenal jenis-jenis komoditas dan cara pembudidayaan atau pengembangbiakan, 2) meningkatnya keterampilan petani dalam memilih jenis komoditas yang sesuai untuk dijadikan usaha dan menjalankan usaha, 3) meningkatnya kepedulian petani untuk menjalankan atau mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi daerah setempat yang dapat dijadikan sebagai matapencaharian tetapnya. Dengan berkembangnya kemampuan petani, maka petani tersebut akan memiliki mata pencaharian tetap kembali dan akhirnya dapat mandiri.

Untuk memperjelas uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan dalam bentuk paradigma. Paradigma atau kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan acuan dasar dan pedoman bagi peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data penelitian, sehingga lebih terfokus sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan. Paradigma

penelitian yang dideskripsikan tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :

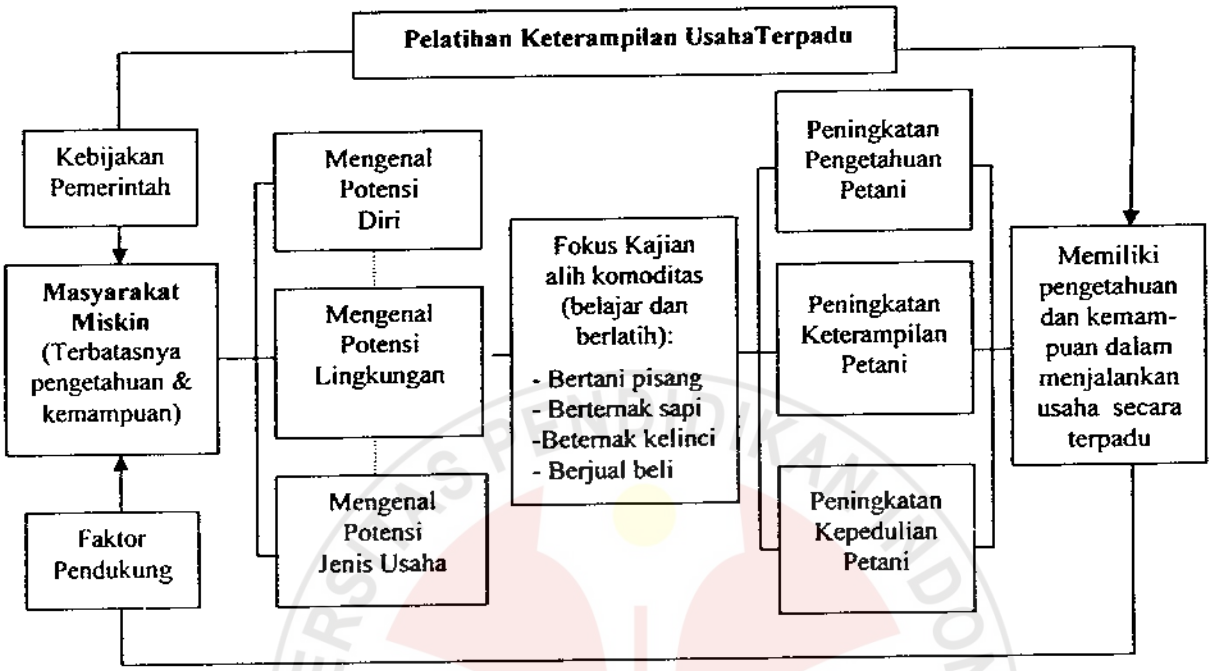

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian